PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

UJANG MAMAN SETIAWAN

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Accrual-based accounting system that is used in the preparation of the financial statements is expected to improve the quality of financial reporting and accountability of local government, but there are a few problems that will arise with the accrual-based accounting system applied in the preparation of the financial statements of the Government, i.e. the required competencies of human resources (HR) professional and competent in financial management, and also master the accounting of Government.

This research aims to identify the factors that influence the implementation of the management information system of the area and the competence of human resources to the quality of the financial report of the Government of the region on a Government BPKD West Bandung Regency.

The methods used in this research is descriptive and verifikatif methods. The samplein this research are 3 sub sections on Government of West Bandung Regency with 50 people, respondents with sampling the
sampling technique using saturated. Technique of data analysis using SEM analysis of Partial Least Square (PLS) with the help of software SmartPLS 3.0. M3.

Research results show that management information systems Areas of significant positive effect to the quality of the local Government Finance Report and the competence human resources significantly positive effect to the quality of the financial report of the Government of the region on a Government BPKD West Bandung Regency.

Keywords: information systems management areas, the competence of human resources, the quality of the financial report of the Government of the region.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah *(governmental accounting)* banyak yang menyatakan merupakan terminologi lama, istilah baru ini didasarkan pada wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintahan merupakan mekaniske akuntansi yang memperoleh transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah (Mursyidi 2013:1).

Salah satu cara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah melakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Sari, 2011).

SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) adalah suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya, dengan aplikasi ini Pemerintah Daerah dapat melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya (Ranti, 2013). Pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Wansyah, et.al, 2012). Sumber daya manusia yang tepatlah yang akan menjadi aset berharga dalam organisasi (Kesuma, et.al 2014).

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah (Nurillah, 2014). Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Cheng et al, 2002; Jamshidi et al, 2013; Indriasih, 2014).

Dari Kepala BPKP Perwakilan Jabar, Deni Suardini (2016) menyatakan bahwa sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) di Jabar hingga kini masih saja ada yang belum berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu penyebabnya sendiri dikarenakan lemahnya pengelolaan aset. Masih menurut Deni Suardini (2016), BPKP sejak beberapa tahun terakhir melakukan pendampingan terhadap Pemda untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengelolaan aset itu, salah satu bentuk dukungan yang diberikan BPKP adalah penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Melihat kenyataan yang ada, dan berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pegawai di BPKD Kabupataen Bandung Barat Ani Ambarsari (2017) Subbidang Akuntansi Penerimaan mengemukakan bahwa peng implementasian aplikasi SIMDA berbasis akrual sampai saat ini masih belum bisa meningkatkan opini yang diberikan BPK menjadi wajar tanpa pengecualian tapi masih wajar dengan pengecualian. Hal tersebut dikarenakan masih adanya faktor yang mempengaruhi pengimplementasian SIMDA diantaranya, kesalahan dalam penginputan penomoran, humman eror, dan sinyal atau jaringan untuk proses pengiriman data selain itu kelemahan dari aplikasi SIMDA ini tidak bisa menampilkan alur kas sehingga harus dilakukannya pengecekan ulang terhadap alurkas tersebut dan penyajiannya masih belum sempurna.

Kemudian permasalah lainnya yaitu, permasalahan aset yang dialami oleh pemerintah desa dengan kendala yang tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, pria yang karib disapa Kang Maman S. Sunjaya (2017) SEKDA Kabupaten Bandung Barat menghimbau para Kepala Desa untuk merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan menguasai Informasi Teknologi (IT) komputerisasi yang handal agar mempermudah pendokumentasian dan pelaporan aset.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menulisakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Bagi instansi pemerintah

Sebagai tambahan informasi mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi Pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banduung Barat dalam mengatasi pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah yang belum baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahnya pemahaman dan memberikan bukti empiris tentang implementasi sistem informasi manajemen daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang pernah di pelajari, melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai implementasi sistem informasi manajemen daerah, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengadakan kajian lebih lanjut dalam topik yang sama.
2. Bagi pihak lain

   Bagi masyarakat khususnya lingkungan perguruan tinggi dengan maksud sebagai pertimbangan atau referensi dalam memperlajari, membahas dan memahami mengenain pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil penelitiannya ini berguna untuk peneliti lain dalam menambah ilmu dan sumber penelitian yang berguna.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi Manajemen Daerah

Menurut Ranti (2013), SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) adalah suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya, dengan aplikasi ini Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya (Ranti, 2013).

2.1.1.1 Indikator Sistem Informasi Manajemen Daerah

Adapun komponen dari sistem informasi akuntansi menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:19) adalah:

1. *Hardware*

   Peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang.
2. *Software*

   Program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data.
3. *Brainware*

   Manusia yang terlibat dalam pengoperasian computer.
4. Prosedur

Tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama

5. Database
   Kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam computer yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak.
6. Jaringan Komunikasi
   sekelompok komputer yang saling dihubungkan dengan menggunakan suatu protokol komunikasi sehingga antara satu komputer dengan komputer yang lain dapat berbagi data atau berbagi sumber daya (*sharing resources*).

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wibowo (2012:95) kompetensi sumber daya manusia adalah:

"Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik".

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.2.1 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut hasil kajian Perrin (dalam Mangkunegara, 2012: 40) yaitu kompetensi sumber daya manusia:

1. Pengetahuan
   Menurut Notoatmojo (2010:7) pengetahuan adalah:
   Hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya).
2. Keterampilan
   Kemampuan menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.
3. Kemampuan
   Menurut Robbin, (2007:57) menyatakan bahwa :
   Kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.
4. Karakteristik kepribadian
   Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, ciri khas dan juga perilaku seseorang dalam bekerja.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mursyidi (2013:47), kualitas laporan keuangan merupakan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran ukuran Normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:146) kualitas laporan keuangan merupakan Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya.

2.1.3.1 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mursyidi (2013 : 47) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mahmudi (2013:27) Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Manurut Halim (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang akan timbul dengan diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, diantaranya yaitu dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan, dan juga menguasai akuntansi pemerintahan.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_0 : Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

H_a : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2015:2) menyatakan bahwa:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Menurut Darmadi (2013:153) menyatakan bahwa:

"Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu".

Sedangkan menurut Ulber Silalahi (2012:12) adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau masalah tersebut".

3.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017:39) definisi dari operasionalisasi variabel adalah suatu atribut seseorang atau obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas atau Independent
   Menurut Sugiyono (2013:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
   Variabel independen pada penelitian ini adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (X_1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2)
2. Variabel terikat atau dependent
   Menurut Sugiyono (2013:40), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
   Variabel dependent dalam hal ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan *(library reserach).* Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*):
   a. Observasi
      Melakukan pengamatan secara langsung pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung barat untuk memperoleh data yang diperlukan.
   b. Wawancara (Interview)
      Menurut Nanang Sunyoto (2013:22) , Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai obyek penelitian.
      Adapun wawancara dilakukan terhadap Kepala Sub Bagian Akuntansi Keuangan pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
   c. Kuesioner
      Menurut Nanang Sunyoto (2013:23) , metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket. Adapun kuesioner dilakukan kepada Pegawai Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bagian Anggaran dan Sub Bagian Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
   d. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun dokumen-dokumen yang menggambarkan struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan seluruh dokumen yang membantu.
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2015: 80), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Pemilihan jumlah populasi ini dirasakan cukup mewakili untuk memberikan data yang

diperlukan dalam penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai unit analisis, dalam hal ini Sub Bagian yang terdapat di BPKD Kabupaten Bandung Barat sebanyak 7 Sub Bagian, namun Sub Bagian yang menggunakan Aplikasi SIMDA pada BPKD Kabupaten Bandung Barat ini hanya terdapat pada 3 Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebanyak 15 orang, Sub Bagian Anggaran sebanyak 13 orang dan Sub Bagian Perbendaharaan sebanyak 22 orang yang dijadikan unit analisis.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif

   Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Data Verifikatif

   Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 3.0.* Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18), *Partial Least Square* (PLS) merupakan merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan penguraian serta menganalisis data yang diperoleh mengenai sistem informasi manajemen daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kulaitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Hasil Pengujian Validitas

   Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya > 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

   Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari kritis 0,30, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas

   Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila

koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

Berdasarkan Nilai koefisien reliabilitas untuk mesing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tepat, dapat dipercaya (reliable) atau andal.

4.1.2 Analisis Deskriptif Sistem Informasi Manajemen Daerah

Tanggapan responden mengenai Sistem Informasi Manajemen Daerah terdiri dari 6 indikator yang dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem Infromasi Manajemen Daerah dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	*Hardware*	**169**	**250**	**67,60%**	**Cukup Baik**
2	*Software*	**155**	**250**	**62,00%**	**Cukup Baik**
3	*Brainware*	**159**	**250**	**63,60%**	**Cukup Baik**
4	Prosedur	**160**	**250**	**64,00%**	**Cukup Baik**
5	*Database*	**163**	**250**	**65,20%**	**Cukup Baik**
6	Jaringan Komunikasi	**158**	**250**	**63,20%**	**Cukup Baik**
	Total	**964**	**1500**	**64,27%**	**Cukup Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2017

Tabel diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah sebesar 964 (64,27%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.

4.1.3 Analisis Deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2)

Tanggapan responden mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri 4 indikator yang dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk mengukur variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.22 sebagai berikut:

Tabel 4.22
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Pengetahuan	**162**	**250**	**64,80%**	**Cukup Baik**
2	Keterampilan	**168**	**250**	**67,20%**	**Cukup Baik**
3	Kemampuan	**170**	**250**	**68,00%**	**Cukup Baik**
4	Karakteristik Kepribadian	**162**	**250**	**64,80%**	**Cukup Baik**
	Total	**662**	**1000**	**66,20%**	**Cukup Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2017

Tabel diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 662 (66,20%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kompetensi Sumber Daya Manusia.

4.1.4 Analisis Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 indikator. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk 4 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.27 sebagai berikut :

Tabel 4.27
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Relevan	**155**	**250**	**62,00%**	**Cukup Baik**
2	Andal	**168**	**250**	**67,20%**	**Cukup Baik**
3	Dapat Dibandingkan	**170**	**250**	**68,00%**	**Cukup Baik**
4	Dapat Dipahami	**158**	**250**	**63,20%**	**Cukup**

					Baik
	Total	**651**	**1000**	**65,10**	**Cukup Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2017

Tabel diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 651 (65,10%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.5 Hasil Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS V.3.0*, maka hasil analisis verifikatif Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Sistem Pengendalian Intern (X_1) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,770 dan termasuk dalam kategori hubungan yang tinggi berada pada interval korelasi antara 0,600-0,799. Artinya Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Nilai Koefisien determinasi (parsial) Sistem Pengendalian Intern (X_1) memberikan pengaruh sebesar 32,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh yang cukup atau sedang antara $0,16 \leq R2 < 0,49$. Sedangkan selisihnya sebesar 67,4% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.
3. Nilai Koefisien determinasi (simultan) Sistem Pengendalian Intern (X_1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 71,30% (tinggi) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), sedangkan selisihnya sebesar 28,7% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 7,102. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**.**

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 4,492. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara nilai korelasi antara Implementasi Sistem Informasi Manajemen

Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,894. Nilai 0,894 menurut Sugiyono (2013:250) berada pada interval 0,80 – 1,00 termasuk kategori sangat kuat dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana semakin baik Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah maka akan diikuti semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1) sebesar 7,102 dengan nilai t tabel sebesar 1,645. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (7,102 > 1,645) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Besarnya pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 52,6% dan sisanya sebesar 47,4% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah dari Kepala BPKP Perwakilan Jabar, Deni Suardini (2016) menyatakan bahwa sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) di Jabar hingga kini masih saja ada yang belum berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu penyebabnya sendiri dikarenakan lemahnya pengelolaan aset. Masih menurut Deni Suardini (2016), BPKP sejak beberapa tahun terakhir melakukan pendampingan terhadap Pemda untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengelolaan aset itu, salah satu bentuk dukungan yang diberikan BPKP adalah penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Melihat kenyataan yang ada, dan berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pegawai di BPKD Kabupataen Bandung Barat Ani Ambarsari (2017) Sub bidang Akuntansi Penerimaan mengemukakan bahwa *pengimplementasian* aplikasi SIMDA berbasis akrual sampai saat ini masih belum bisa meningkatkan opini yang diberikan BPK menjadi wajar tanpa pengecualian tapi masih wajar dengan pengecualian. Hal tersebut dikarenakan masih adanya faktor yang mempengaruhi pengimplementasian SIMDA diantaranya, kesalahan dalam penginputan penomoran, *humman error*, dan sinyal atau jaringan untuk proses pengiriman data selain itu kelemahan dari aplikasi SIMDA ini tidak bisa menampilkan alur kas sehingga harus dilakukannya pengecekan ulang terhadap alurkas tersebut dan penyajiannya masih belum sempurna.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator *brainware* dengan presentase sebesar 63,60% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 36,40%. Yang artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam *brainware*. Dan indikator jaringan komunikasi dengan presentase sebesar 63,20% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 36,80%. Yang artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam jaringan komunikasi.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 64,27% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 35,73% yang merupakan masalah yang ada pada Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 65,10% dan masuk dalam kategori cukup baik yang artinya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 34,90%.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang semakin baik akan membuat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik pula pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Mahmudi (2013:27) Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa mengakibatkan laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Dan didukung oleh penelitian terdahulu oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan. Dan Mohammad Alfian (2015) bahwa implementasi SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan atau LKPD yang dihasilkan oleh SKPD. Dengan demikian berarti hipotesis ke empat didukung oleh temuan hasil penelitian.

4.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara nilai korelasi antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,856. Nilai 0,856 menurut Sugiyono (2013:250) berada pada interval 0,80 – 1,00 termasuk kategori sangat kuat dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan diikuti semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 4,492 dengan nilai t tabel sebesar 1,645. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (4,492 > 1,645) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi secara signifikan oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia. Besarnya pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 31,2% dan sisanya sebesar 68,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adapun fenomena Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah Dirjend Keuangan Kemendagri, Perwakilan BPK RI dan peserta yang sebagian besar Akuntan itu, Bupati Irwan (2016) yang juga mewakili APKASI menjelaskan, bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SIABA) ini diaplikasikan pada Pemda Daerah (Pemda) Kabupaten Kota diseluruh Indonesia dengan baik, yaitu dengan cara mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam penerapan Sistem Informasi tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi dan perlu menjadi perhatian yakni keterbatasan sumber daya manusia yang sangat terbatas dalam penerapan sistem itu.

Masih menurut Bupati Irwan (2016) yang juga mewakili APKASI menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituntut transparan dan akuntabel saat ini, bukan hanya sekedar ilmu catat mencatat keuangan, tetapi membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang bisnis proses pengelolaan keuangan daerah, dan SDM yang mengelola harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pemerintahan daerah dan kaitanya dengan instansi lain, hingga dinamika politik.

Kemudian permasalah lainnya yaitu, permasalahan aset yang dialami oleh pemerintah desa dengan kendala yang tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, pria yang karib disapa Kang Maman S. Sunjaya (2017) SEKDA Kabupaten Bandung Barat menghimbau para Kepala Desa untuk merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan menguasai

Informasi Teknologi (IT) komputerisasi yang handal agar mempermudah pendokumentasian dan pelaporan aset.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator pengetahuan dengan presentase sebesar 64,80% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 35,20%. Yang artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam pengetahuan. Dan indikator kemampuan dengan presentase sebesar 68,00% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 32,00%. Yang artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam kemampuan.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 66,20% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 33,80% yang merupakan masalah yang ada pada Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 65,10% dan masuk dalam kategori cukup baik yang artinya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah cukup baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 34,90%.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Keterkaitan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Kompetensi Sumber Daya Manusia yang semakin baik akan membuat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik pula pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Halim (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang akan timbul dengan diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, diantaranya yaitu dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan, dan juga menguasai akuntansi pemerintahan.

Dan teori oleh Warisno (2008) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang akuntansi, karena laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. SDM yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Sebaliknya, kegagalan SDM dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam menyusun laporan keuangan dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Teori di atas didukung oleh berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Febrian Cahyo Pradono Basukianto (2015) menyatakan bahwa secara statistik bahwa SDM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan jurnal yang ditulis oleh Indra Suyoto Kurniawan (2016) bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**.**

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh implementasi sistem manajemen daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem manajemen daerah berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dengan kategori korelasi sangat kuat dan positif, yang artinya semakin baik implementasi sistem informasi manajemen daerah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun ada beberapa yang menyebabkan implementasi sistem informasi manajemen daerah belum maksimal yaitu pada aspek *brainware* dan jaringan komunikasi. Sehingga implementasi sistem manajemen daerah cukup baik. Dan berimbas pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang baik/maksimal. Pada penelitian ini implementasi sistem manajemen daerah yang terjadi pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berada dalam kriteria cukup baik, tetapi hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada implementasi sistem informasi manajemen daerah.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dengan kategori korelasi kuat atau erat dan positif, yang artinya semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin tinggi pula kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun ada yang menyebabkan kompetensi sumber daya manusia belum maksimal yaitu kurang mendukungnya pengetahuan dan kemampuan. Sehingga penilaian kompetensi sumber daya manusia cukup baik. Dan berimbas pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang baik/maksimal. Pada penelitian ini kompetensi sumber daya manusia yang terjadi pada 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berada dalam kriteria cukup baik, hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada kompetensi sumber daya manusia.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Bagi 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

   Diharapkan sebaiknya 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan perbaikan terhadap jaringan komunikasi agar mendukung kinerja dalam implementasi sistem informasi manajemen daerah. Hal tersebut bisa terwujud apabila bekerja sama dengan perusahaan penyedia fasilitas internet. Dan 3 Sub Bagian diharapkan juga mampu menempatkan pegawai pada posisi yang tepat dalam menjalani implementasi SIMDA, pegawai tersebut sebagai *brainware* yang ahli dan kompeten dalam menjalankan komputer yang sesuai dengan bidangnya.
2. Bagi Pegawai

   Diharapkan kompetensi sumber daya manusia dan implementasi sistem informasi manajemen daerah semakin baik, sebaiknya pegawai/ karyawan 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus menambah pengetahuan dan kemampuan dalam hal implementasi sistem informasi manajemen daerah serta dalam membuat laporan keuangan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pelatihan dan seminar yang diadakan secara rutinitas untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Implementasi sistem informasi manajemen daerah dan kompetensi sumber daya manusia, akan berdampak pada kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah di 3 Sub Bagian yang menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Lain
   Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

As Syifa Nurillah dan Dul Muid. 2014. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemamfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok*. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 3 No. 2.

Boynton Johnson Kell. 2003 *Moderan Auditing* Edisi ke 7

Bambang wahyudiono, SE, MM, QIAMudah membaca laporan keuangan Cetakan 1 Jakarta (2014)

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Jakarta: BPK RI.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Kerangka Arsitektur SIMDA 2012*. Jakarta: BPK RI.

Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Deddi Nordiawan. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Erwan, Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial.* Yogyakarta: Gava Media.

Harahap, Sofyan Syafri, 2013, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Cetakan Kesebelas, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Indiwan seto wahjuwibowo 2015 *Seri Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta

Ihyaul Ulum. 2008. *Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.

Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPPS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.* Jurnal Akuntansi. Vol 2 No. 1 Tahun 2014.

Lilis Pusitawati dan Sri Dewi Anggadini 2011. *Sistem Informasi Akuntansi.* Edisi Pertama. Cetakan Pertama 2011

Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mahsun, Moh.,Sulistyowati, Firma., dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2011a. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE.

Menteri Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Pemerintah dalam negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan kedua. Bandung: Reflika ADITAMA.

Nanang Martono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.* Jakarta: Rajawali Pers.

Noor, Juliansyah. (2011). *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana

Nur Indrianto dan bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Nurlan *Darise*. *2008. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.

Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintah.* Jakarta: IN MEDIA.

Novita Lusiana, Rika Andriani dan Miratu Megasari 2015. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan* Yogyakarta

eraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Parulian Hutapea MBA *Kompetensi Plus Teoti, Desain, Kasus dan penerapan HR serta Organisasi yang dinamis* edisi ke 1 Jakarta: 2008

Rahmadi Murwanto. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.* LPKPAP.

Ranti 2013 *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Sujarweni V, Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi.* Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Mohammd Alfian. 2015 *Faktor Pendukung Implemetasi Simda DanPengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Skpd Kabupaten Kulon Progo V olume XVIII No. 3, Desember 2015 ISSN 1979 - 6471*

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada tanggal 10 April 2015.

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

http://eprints.ung.ac.id/2764/5/2012-1-74201-271408002-bab2-13082012025149.pdf

http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-boykefitri-34970-7-unikom_b-i.pdf

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-00081-MNSI%20Bab2001.pdf

http://sumberpengertian.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-informasi-secara-umum-dan.html

http://simdablog.blogspot.co.id/

http://www.kembar.pro/2016/01/pengertian-fungsi-dan-contoh-sistem-informasi-manajemen.html

http://masalahkeuangandaerah.blogspot.co.id/2014/02/analisis-kemandirian-keuangan-daerah.html

http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-keuangan-daerah.html

http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6657/Bab%202.pdf?sequence=10

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43170/Chapter%20II.pdf;jsessionid=C0586F800F33034A04ACEF587F5A2265?sequence=4

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57408/Chapter%20II.pdf;jsessionid=3049C0AF0D090068AA5C9492E0ECDC20?sequence=4

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6524/Bab%202.pdf?sequence=9

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20249/Chapter%20I.pdf;jsessionid=4633EE629052BC858469BE0FB1175118?sequence=4

http://www.bandungbaratkab.go.id/content/informasi

(https://www.merdeka.com/peristiwa/lemah-kelola-aset-alasan-daerah-tak peroleh-wtp-dari-bpk.html)
https://books.google.co.id/books?id=9X9QDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sistem+informasi+manajemen&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem%20informasi%20manajeme&f=false

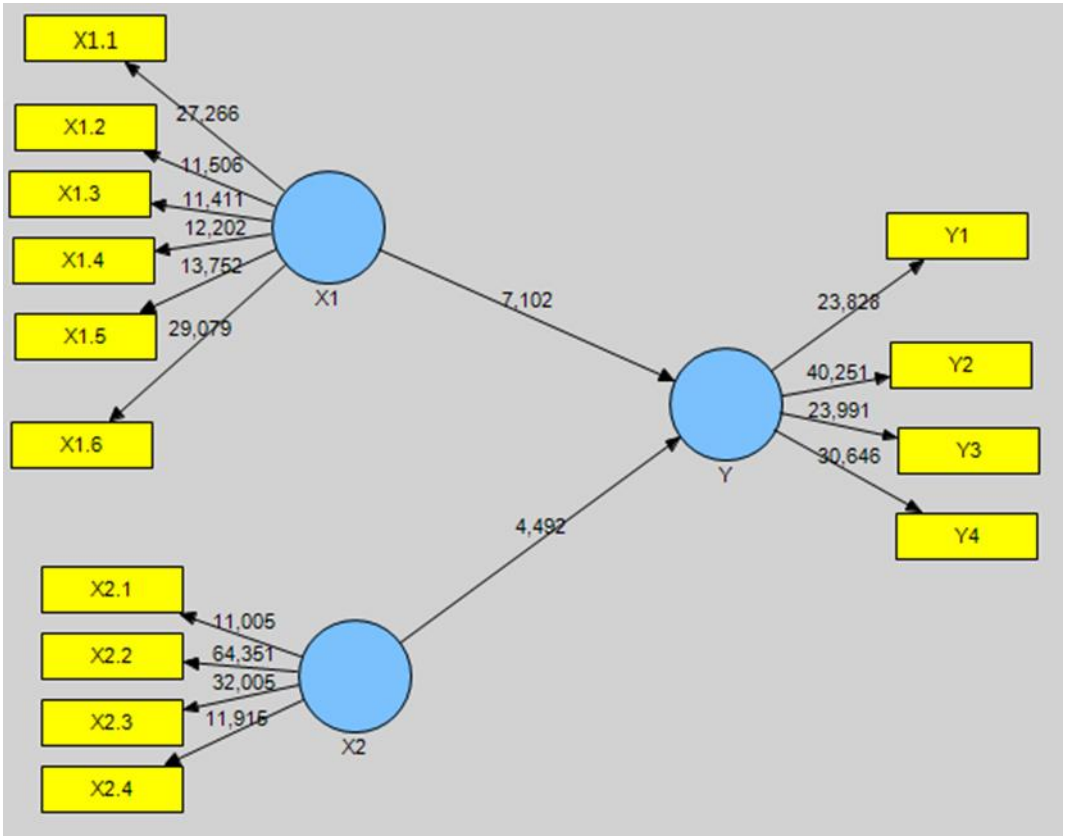
http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7252/Bab%201.pdf?sequence=9

https://www.goriau.com/berita/pemerintahan/ini-pemaparan-bupati-irwan-saat-jadi-pembicara-di-rpsc-dan-kna-ke8-tahun-2016.html

https://www.merdeka.com/peristiwa/lemah-kelola-aset-alasan-daerah-tak-peroleh-wtp-dari-bpk.html

LAMPIRAN

Koefisien Jalur Struktural



Path Coefficients UJI T

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X_1 -> Y	0,588	7,102	1,645	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS

Nilai T hitung

